

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia semakin pesat, Tuntutan masyarakat pada pemerintah pusat maupun daerah terhadap laporan keuangan yang akuntabilitas terus meningkat. Akuntabilitas ini penting bagi pengelolaan pelaporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah dalam kaitannya dengan perubahan informasi akuntansi dan administrasi publik. Pemerintah daerah sebagai salah satu organisasi sektor publik memiliki kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggung jawabkan serta berkualitas yang dapat dipergunakan oleh pihak yang membutuhkan sebagai pengambilan keputusan.

Laporan keuangan merupakan bagian penting dari pemerintah dan perlu diperhatikan dalam penyajiannya serta merupakan bentuk pertanggung jawaban pemerintah berdasarkan kinerja pengelolaan keuangannya kepada publik. Ketika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaksanakan audit pada laporan keuangan pemerintah daerah tetapi masih menemukan adanya penyajian data dalam laporan keuangan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku serta masih terdapat adanya kesalahan. Oleh sebab itu, dalam menyajikan laporan keuangan daerah harus memuat informasi yang benar dan valid sehingga laporan keuangan tersebut bisa dengan mudah dipahami dan penyajiannya harus memenuhi kriteria karakteristik kualitatif yang sudah diatur dalam peraturan pemerintah

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yakni, 1) Relevan, 2) Andal, 3) Dapat dibandingkan, 4) Dapat dipahami. Informasi yang tercantum pada laporan keuangan pemerintah daerah telah sesuai kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang ditentukan, artinya pemerintah daerah dapat menghasilkan transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan laporan keuangan daerah, jika tidak sesuai maka akan menjadikan kerugian pada pemerintah daerah antara lain penerimaan akan berkurang, kelemahan administrasi, ketidak-efisienan, dan ketidak-efektifan Handayani, 2015 dalam Saifudin Dan Aprilia, (2020). Menurut PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, laporan yang dihasilkan dari penerapan SAP dimaksudkan untuk memberikan manfaat lebih baik kepada yang berkepentingan, baik pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh.

Kualitas laporan keuangan merupakan sejauh mana laporan keuangan memberikan informasi yang benar dan jujur Tyas dkk.,(2020). Laporan keuangan daerah yang berkualitas bisa dilihat dari opini yang diberikan oleh (BPK) atas pemeriksaan laporan keuangan daerah. Terdapat empat jenis opini yang diberikan BPK atas pemeriksaan laporan keuangan, yakni Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Opini Pernyataan Menolak Memberikan Pendapat atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Ketika (BPK) memberikan opini wajar

tanpa pengecualian pada suatu laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diperiksa, hal ini dapat diartikan bahwa laporan keuangan yang disajikan/dilaporkan pemerintah daerah telah sesuai syarat atau dapat diartikan laporan keuangan sudah disajikan dan diterangkan secara relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami Mulyadi (2013:12). Selain dari opini Laporan keuangan daerah yang berkualitas bisa dilihat apabila dalam penyajiannya sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

**Tabel 1.1**  
**Daftar Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Demak 2013-2020**

No	Tahun	Opini
1.	2013	Wajar Dengan Pengecualian
2.	2014	Wajar Dengan Pengecualian
3.	2015	Wajar Dengan Pengecualian
4.	2016	Wajar Tanpa Pengecualian
5.	2017	Wajar Tanpa Pengecualian
6.	2018	Wajar Tanpa Pengecualian
7.	2019	Wajar Tanpa Pengecualian
8.	2020	Wajar Tanpa Pengecualian
9.	2021	Wajar Tanpa Pengecualian

Sumber : <https://jateng.go.id/lhp-lkpd>

Laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Demak pada tahun 2020 berhasil memperoleh opini wajar tanpa pengecualian yang diberikan oleh BPK RI perwakilan jawa tengah dan pada tahun 2021 laporan keuangan daerah Kabupaten Demak berhasil mempertahankan perolehan opini wajar tanpa pengecualian. Diperolehnya opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Demak bukan berarti bebas dari kesalahan atau permasalahan terdapat beberapa catatan yang diberikan oleh BPK terkait dengan laporan keuangan daerah Kabupaten Demak. Hasil pemeriksaan (BPK) RI Perwakilan jawa tengah terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten

Demak tahun 2020 dan 2021 (BPK) menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidak patuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Tahun 2020 BPK menemukan permasalahan antara lain : kekurangan volume atas enam pekerja, denda keterlambatan yang seharusnya belum dikenakan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran dan penatausahaan aset belum tertip mengakibatkan laporan inventaris barang (KIB) tidak informatif dalam mendukung penyajian aset tetap pada neraca serta dapat terjadinya resiko kehilangan aset tetap. Sedangkan pada tahun 2021 masalah yang terjadi diantaranya: pengamanan fisik persediaan bahan belum dilakukan karena tempat penyimpanan persediaan bahan tidak pada gudang milik pemerintah daerah, pengamanan administrasi dan fisik tanah milik pemerintah Kabupaten Demak belum sepenuhnya dilakukan karena masih ada aset tanah yang belum bersertifikat dan aset tanah yang belum dipasang papan nama. (<https://ppid.demakkab.go.id/opini-bpk/>).

Kepala perwakilan BPK Jateng Ayub Amali (2020) pada saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksa LKPD tahun anggaran 2020 menyampaikan meski kabupaten daerah berhasil mempertahankan opini WTP, masih ada beberapa permasalahan yang perlu menjadikan perhatian masing masing pemda, antara lain terkait dengan kekurangan volume pekerjaan dan masih ditemukan masalah dalam pengelolaan aset. (<https://jateng.bpk.go.id/bpk-jateng-beri-opini-wtp-pada-lkpd-kabupaten-demak-sragen-danwonogiri/>).

Permasalahan tersebut menandakan bahwa laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah Kabupaten Demak masih lemah terkait dengan

penatausahaan aset daerah. Permasalahan itu terjadi karena belum diterapkannya secara maksimal sistem akuntansi keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masih adanya kelemahan sistem pengendalian intern yang menunjukkan bahwa masih lemahnya kompetensi sumber daya manusia. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Demak harus dapat memperbaiki dalam melakukan pencatatan penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai dengan standard akuntansi pemerintah yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan perundang undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah, sehingga pemerintah Kabupaten Demak dalam menghasilkan laporan keuangan daerah akan sepenuhnya berkualitas dan bermanfaat sebagai pengambilan keputusan.

Ada beberapa faktor yang dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Faktor pertama yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah adalah kompetensi sumber daya manusia, Kompetensi sumber daya manusia adalah kompetensi yang berkaitan pada pengetahuan, kemampuan, ketrampilan, dan karakteristik kepribadian yang dapat mempengaruhi suatu pekerjaannya Mangkunegara (2012) dalam Tyas dkk.,(2020). Kompetensi sumber daya manusia salah satu peran penting pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah. Mengingat pentingnya kompetensi sumber daya manusia pada OPD, diperlukan orang-orang berkompeten yang mempunyai latar belakang pendidikan dibidang akuntansi dan mampu memahami peraturan penyusunan laporan keuangan

sesuai dengan standard akuntansi pemerintah sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan. Jika sumber daya manusia tidak memiliki kompetensi yang ada diatas akan terjadi hambatan dan kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan, dan laporan yang dihasilkan kualitasnya akan menjadi buruk. Penelitian yang dilakukan oleh Oktavia dan Rahayu, (2019) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian Eka dan Fidiana, (2020) yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Suhardjo, (2019) yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Faktor kedua yang mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah adalah komitmen organisasi. Menurut (Mutiana dkk., 2017) komitmen organisasi adalah tingkat sejauh mana seseorang pegawai memihak kepada suatu organisasi tertentu dan tujuan tujuannya, serta berniat untuk mempertahankan keanggotaanya dalam organisasi. Komitmen organisasi sebagai tingkat kekuatan identifikasi individu, kepedulian penuh dan ketertarikan individu terhadap organisasi. Komitmen organisasi sangat dibutuhkan oleh sebab itu, pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharuskan mempunyai komitmen organisasi yang sangat tinggi supaya pada saat menjalankan pekerjaanya dengan bersungguh sungguh dan tanggungjawab. Penelitian yang dilakukan oleh Oktavia dan Rahayu, (2019) menunjukkan bahwa komitmen

organisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal tersebut berbeda dengan Penelitian yang dilakukan oleh Kristina dkk., (2020) menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian Ayu dan Putra, (2022) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Faktor ketiga yang dapat berpengaruh pada kualitas laporan keuangan daerah adalah sistem akuntansi keuangan daerah. Dalam penyusunan laporan keuangan dibutuhkan suatu sistem akuntansi. Sistem akuntansi keuangan daerah ini sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah dalam melakukan penyusunan laporan keuangan supaya hasil laporan keuangan daerah yang diperoleh berkualitas. Sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) berdasarkan (Peraturan Menteri Dalam Negeri, No 21 Tahun 2011) merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Apabila sistem akuntansi keuangan daerah belum dipahami oleh pegawai organisasi perangkat daerah (OPD) maka akan terjadi permasalahan seperti menghambat dalam penyusunan laporan keuangan daerah dan hasil dari kualitas laporan keuangan daerah itu sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh Oktavia dan Rahayu (2019) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian ini juga didukung oleh Rahman dan Permatasari, (2021) yang menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh

positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Berbeda dengan Penelitian yang dilakukan oleh Suhardjo, (2019) yang menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Faktor keempat yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah adalah aksesibilitas. Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan Hadijah, (2017). Pemerintah daerah terkait pertanggung jawabannya atas pengelolaan keuangan yang sudah disajikan berupa laporan keuangan daerah harus memfasilitasi dan memberikan kemudahan kepada publik untuk dapat memperoleh informasi laporan keuangan melalui berbagai media, selain menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah dituntut dapat memberikan kemudahan mengakses bagi pengguna laporan keuangan baik pihak internal maupun eksternal. Penelitian yang dilakukan oleh Hadijah,(2017) menyatakan bahwa aksesibilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian ini juga didukung oleh Nasution, (2020) yang menyatakan bahwa aksesibilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Muafi, (2018) yang menyatakan bahwa aksesibilitas tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini didasari pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Oktavia dan Rahayu, (2019) yang berjudul pengaruh kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah (studi empiris pada satuan kerja perangkat

daerah kota bandung). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktavia dan Rahayu, (2019) yaitu perbedaan pertama terdapat penambahan satu variabel independen yaitu aksesibilitas alasan peneliti menambahkan variabel tersebut harapannya pihak eksternal maupun internal dapat dengan mudah memperoleh akses informasi laporan keuangan daerah. Dengan kemudahan itu maka dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak eksternal maupun internal akan semakin lebih cepat serta dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan. Perbedaan kedua yaitu pada objek penelitian, dimana penelitian Oktavia dan Rahayu, (2019) meneliti objek pada SKPD kota Bandung dan untuk penelitian ini meneliti OPD kabupaten Demak.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, peneliti melakukan penelitian dengan judul : **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Aksesibilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Demak)**

## **1.2. Ruang Lingkup**

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka penulis membatasi ruang lingkup pokok pembahasan dalam permasalahan sebagai berikut :

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi, sistem akuntansi keuangan daerah, dan aksesibilitas terhadap kualitas laporan keuangan.

2. Objek penelitian dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Demak.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah aksesibilitas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisis mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk menguji dan menganalisis mengenai pengaruh komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk menguji dan menganalisis mengenai pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4. Untuk menguji dan menganalisis mengenai pengaruh aksesibilitas terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### **1.5. Kegunaan penelitian**

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat memberikan kegunaan kepada berbagai pihak, antara lain sebagai berikut :

1. Kegunaan secara teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan berkaitan dengan pengaruh kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi, sistem akuntansi keuangan daerah, dan aksesibilitas. Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk melakukan penelitian yang akan datang dalam bidang kualitas laporan keuangan daerah.
  - b. Bagi masyarakat diharapkan dapat menjadi penelian terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas atau sebaliknya.
2. Kegunaan secara praktis
  - a. Bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemerintah kabupaten demak diharapkan bermanfaat lebih guna sebagai penunjang kontribusi praktik kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi, sistem akuntansi keuangan daerah dan aksesibilitas pada kualitas laporan keuangan daerah.